ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)

Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS

Antroposentrisme Struktural: Kegagalan Visi Pembangunan dan Krisis Etika Lingkungan dalam Kebijakan Nomenklatur Jagung di Pulau Sumbawa

Sulaiman1*, Muhammad Sarjan[2]
Magister Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram
Jl. Pendidikan No.37, Dasan Agung Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125

**Correspondent email: mesa.geo04@gmail.com*

Diterima: 28 Desember 2025| Disetujui: 28 Apri l 2026 | Diterbitkan: 29 April 2026

Abstract. *This study critically assesses regional development policies on Sumbawa Island, particularly the PIJAR program (Cattle, Corn, and Seaweed) and the corn nomenclature, through the perspectives of environmental ethics and critical theory. Employing a mixed-method approach, the research integrates a spatial analysis of land cover changes in the Padolo River Basin during 2017-2024 with a policy text examination based on Jürgen Habermas's theory of the "Colonization of the Lifeworld." The findings reveal that these policies reflect structural anthropocentrism, prioritizing economic production targets over ecological integrity in a top-down fashion. The consequence is a destructive transformation of the regional landscape, where the depletion of upstream forests triggers Policy-Induced Disaster phenomena, including increased frequency of floods and extreme droughts. The study concludes that the ecological crisis on Sumbawa Island is the result of a failed development vision that neglects the carrying capacity of nature and the government's inability to provide alternative employment opportunities for the community.*

Keywords: *Anthropocentric; Economic Production; Ecological Integrity; PIJAR Program; Sumbawa Island.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di era modern sering kali terjebak dalam paradigma antroposentrisme yang akut, di mana alam diposisikan semata-mata sebagai instrumen pemuas kebutuhan ekonomi manusia (Muthmainnah et al., 2021). Di Pulau Sumbawa, manifestasi nyata dari paradigma ini terangkum dalam kebijakan "Nomenklatur Jagung". Kebijakan ini, yang didorong secara struktural melalui program regional seperti PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) serta program nasional UPSUS PAJALE, telah menempatkan komoditas jagung sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi daerah (Ponto et al., 2017; Yasin, 2017). Namun, di balik angka produksi yang membanggakan, tersimpan kegagalan visi pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan integritas ekosistem.

Secara teoretis, krisis ini dapat dibedah melalui kacamata teori kritis Jürgen Habermas mengenai "Kolonisasi Lifeworld". Dalam konteks ini, "Sistem" yang diwakili oleh logika pasar dan birokrasi negara telah mendikte "Dunia Kehidupan" (Lifeworld) masyarakat dan alam (Ardiansyah et al., 2024). Kebijakan pemerintah tidak lagi bersifat komunikatif, melainkan instruktif demi mengejar target swasembada. Alam tidak lagi dipandang sebagai Oikos (rumah tangga kehidupan), melainkan sebagai komoditas frontiers yang harus diekspansi secara masif (Moore, 2000).

Kegagalan struktural ini terlihat jelas pada dua aspek. Pertama, ketimpangan regulasi dan lemahnya pengawasan lahan yang memberikan ruang bagi perambahan hutan hulu (Irawansah et al., 2023). Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja alternatif, sehingga masyarakat seolah "dipaksa" bergantung pada budidaya jagung di lahan pegunungan (Putra et al., 2024). Dampaknya terlihat nyata si Pulau Sumbawa, menurut data Global Forest Watch (https://gfw.global/Y9AYkS) dari tahun 2001 hingga 2024, Nusa Tenggara Barat kehilangan 100 ribu hektar tutupan pohon, setara dengan 9,0% dari luas tutupan pohon tahun 2000, dan 59 juta ton emisi CO_2e. Masih menurut data Global Forest Watch, Di Nusa Tenggara Barat, tiga wilayah teratas yang bertanggung jawab atas 80% dari semua kehilangan tutupan pohon antara 2001 dan 2024 adalah kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dengan total kehilangan tutupan pohon sbesar 83.000 Ha. Kabupaten Sumbawa mengalami kehilangan tutupan pohon paling banyak sebesar

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)
Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

34.000 ha. Realitas ini berkonfrontasi langsung dengan penderitaan masyarakat di hilir, di mana frekuensi banjir meningkat tajam sementara tingkat kekeringan saat musim kemarau semakin parah (Darajat et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan "Nomenklatur Jagung" di Pulau Sumbawa dalam prioritas program Provinsi NTB untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut) mencerminkan praktik antroposentrisme secara struktural, dan Sejauh mana kegagalan struktural pemerintah dalam pengawasan lahan dan penyediaan lapangan kerja alternatif berkontribusi terhadap krisis ekologi di pulau Sumbawa.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi pada studi filsafat lingkungan dan sosiologi pembangunan, khususnya mengenai dampak kebijakan ekonomi makro terhadap kelestarian ekosistem lokal. Dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB dalam meninjau ulang kebijakan "Nomenklatur Jagung" dan merumuskan strategi diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

Antroposentrisme merupakan sebuah paradigma filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh alam semesta (Keraf, 2010).. Dalam pandangan ini, alam semesta hanya dilihat sebagai objek atau instrumen yang memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia (utilitarianisme instrumental). Menurut A. Sonny Keraf, krisis lingkungan global saat ini berakar pada kegagalan cara pandang ini yang memisahkan manusia dari komunitas ekologisnya (Rezeki et al., 2023). Keraf menawarkan konsep Oikos, yang berarti "rumah tangga", di mana alam bukan sekadar tempat tinggal melainkan sebuah sistem kehidupan yang saling bergantung satu sama lain.

Dalam konteks "Antroposentrisme Struktural", paradigma ini tidak hanya berhenti pada level pemikiran individu, melainkan terlembagakan ke dalam struktur negara, kebijakan publik, dan sistem ekonomi. Negara menggunakan otoritasnya untuk memberikan legitimasi atas eksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik (Muthmainnah et al., 2020). Kebijakan "Nomenklatur Jagung" di NTB (PIJAR) adalah representasi dari struktur ini, di mana regulasi dan anggaran diarahkan secara masif untuk mengubah fungsi ekologis hutan menjadi fungsi ekonomi produksi.

Jürgen Habermas dalam karyanya The Theory of Communicative Action membagi realitas sosial ke dalam dua ranah: Sistem (System) dan Dunia Kehidupan (Lifeworld). Sistem dikendalikan oleh media "uang" (ekonomi) dan "kekuasaan" (birokrasi), sementara Dunia Kehidupan adalah ruang interaksi sosial, budaya, dan kearifan lokal yang berbasis pada tindakan komunikatif. Kolonisasi terjadi ketika logika sistem mendikte dunia kehidupan. Di Pulau Sumbawa, instruksi top-down untuk mengejar target jagung telah mempinggirkan ruang dialog ekologis oleh dominasi kekuasaan administratif dan pasar (Ardiansyah et al., 2024).

Jason Moore (2000) menjelaskan bahwa kapitalisme selalu mencari "alam yang murah" (cheap nature) sebagai wilayah baru eksploitasi. Jagung di Pulau Sumbawa menjadi frontier baru karena kawasan pegunungan menyediakan lahan subur yang dikonversi dengan biaya rendah melalui skema bantuan pemerintah tanpa batas ekologis yang jelas (Beckert et al., 2021).

Degradasi ekologis di Pulau Sumbawa saat ini telah mencapai level krisis regional yang sistematis. Transformasi lansekap yang masif didorong oleh ambisi menjadikan Pulau Sumbawa sebagai sabuk jagung (maize belt) nasional. Berdasarkan data alih fungsi lahan, kawasan hutan di Pulau Sumbawa mengalami penyusutan tajam akibat ekspansi lahan pertanian monokultur. Di Bima, Dompu, dan Sumbawa, perluasan lahan jagung telah merambah kawasan hutan lindung (Irawansah et al., 2023; Putra et al., 2024). Dampaknya bersifat regional: banjir bandang di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau menjadi siklus bencana tahunan di seluruh kabupaten se-Pulau Sumbawa (Darajat et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pengembangan jagung di Bima dalam perspektif teori kritis Habermas dan etika lingkungan, membedah peran kegagalan struktural birokrasi dalam memicu perambahan kawasan hutan dan ketergantungan ekonomi masyarakat, dan menjelaskan korelasi antara degradasi hutan hulu dengan peningkatan bencana hidrologis (banjir dan kekeringan) di Kota Bima.

METODE PENELITIAN

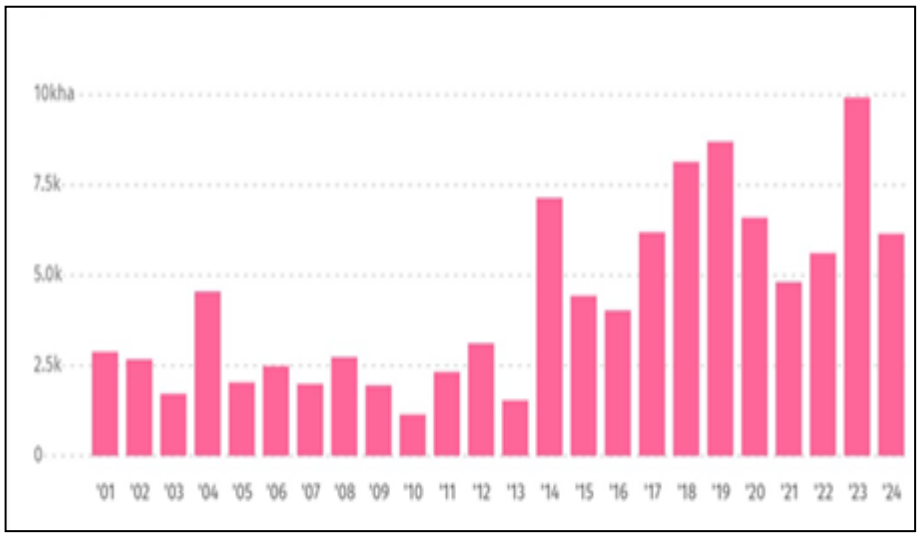
Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-method) dengan fokus utama pada analisis kualitatif interpretatif-kritis. Pendekatan ini bertujuan mengevaluasi kebijakan PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) sebagai bentuk etika antroposentris struktural yang bersifat top-down. Menurut Creswel dan Clark dalam buku Desain Penelitian Mixed Method (Ismail Pane dkk, 2021) penelitian campuran (mixed methods research) merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis di samping sebagai metode inquiry. Data kuantitatif (spasial dan statistik) digunakan sebagai bukti objektif untuk mengonfirmasi kegagalan visi ekologis dalam kebijakan ekonomi regional tersebut.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)
Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

Penelitian dilakukan pada skala regional di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan lokus utama pada pusat-pusat ekspansi jagung di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Skala regional dipilih karena kebijakan PIJAR diterapkan secara masif di seluruh daratan Pulau Sumbawa.

Data Kebijakan: Dokumen regulasi program PIJAR, UPSUS PAJALE, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten-kabupaten di Pulau Sumbawa sebagai objek bedah etika struktural. Data Sekunder berupa laju devorestasi NTB tahun 2001 sampai tahun 2024 dari Global Forest Watch.



Gambar 1. Grafik laju kehilangan tutupan pohon di NTB (*Sumber: Global Forest Watch)*

Analisis Dampak Spasial Regional: Mengukur luas konversi hutan di kawasan pulau sumbawa untuk membuktikan korelasi antara target capaian program PIJAR (khususnya komoditas jagung) dengan degradasi tutupan lahan. Kritik Etika Struktural (Habermas): Melakukan bedah teks terhadap nomenklatur kebijakan PIJAR untuk mengungkap pola "Kolonisasi Lifeworld", di mana kepentingan pasar jagung dan target administratif negara mendominasi ruang hidup dan kelestarian ekosistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomenklatur Jagung sebagai Manifestasi Antroposentrisme Struktural

Hasil analisis terhadap dokumen kebijakan pembangunan regional, khususnya program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut), menunjukkan dominasi paradigma antroposentrisme yang akut. Pemerintah memposisikan jagung sebagai "nomenklatur penyelamat" ekonomi regional Pulau Sumbawa. Secara struktural, visi ini diterjemahkan ke dalam target produksi masif yang memaksa instrumen birokrasi bekerja demi satu tujuan: pertumbuhan angka PDRB dan swasembada pangan.

Dalam perspektif Jürgen Habermas, fenomena ini adalah bentuk nyata dari Kolonisasi Lifeworld oleh Sistem. Logika pasar dan birokrasi telah mendikte interaksi masyarakat dengan alam. Di Pulau Sumbawa, alam tidak lagi dipandang sebagai sistem pendukung kehidupan yang otonom, melainkan sebagai commodity frontiers yang harus dikonversi menjadi lahan produksi. Kebijakan ini bersifat top-down, di mana indikator keberhasilan hanya diukur dari volume ekspor, sementara kerusakan ekologis regional tidak masuk dalam kalkulasi akuntansi pembangunan negara.

Transformasi Lansekap Regional: Ekspansi Sabuk Jagung Pulau Sumbawa

Kebijakan PIJAR secara langsung memicu transformasi lansekap yang masif di seluruh daratan Pulau Sumbawa. Ambisi menjadikan pulau ini sebagai "Sabuk Jagung" (Maize Belt) nasional telah mendorong ekspansi lahan hingga ke kawasan hulu dan pegunungan di berbagai kabupaten. Data spasial menunjukkan tren degradasi regional yang mengkhawatirkan. Data dari Global Forest Watch (2025) menunjukkan bahwa antara tahun 2001-2024 NTB kehilangan 100.000 Ha tutupan pohon, dari jumlah tersebut pulau sumbawa menyumbangkan lebih dari 80% kehilangan. Tiga kabupaten penyumbang hilangnya tutupan pohon terbesar adalah kabupaten Sumbawa, kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat hanya

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)
Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

menyumbangkan 7.000 ha kehilangan tutupan pohon, dan Kota Bima hanya menyumbang 550 ha kehilangan tutupan pohon (tabel 1).

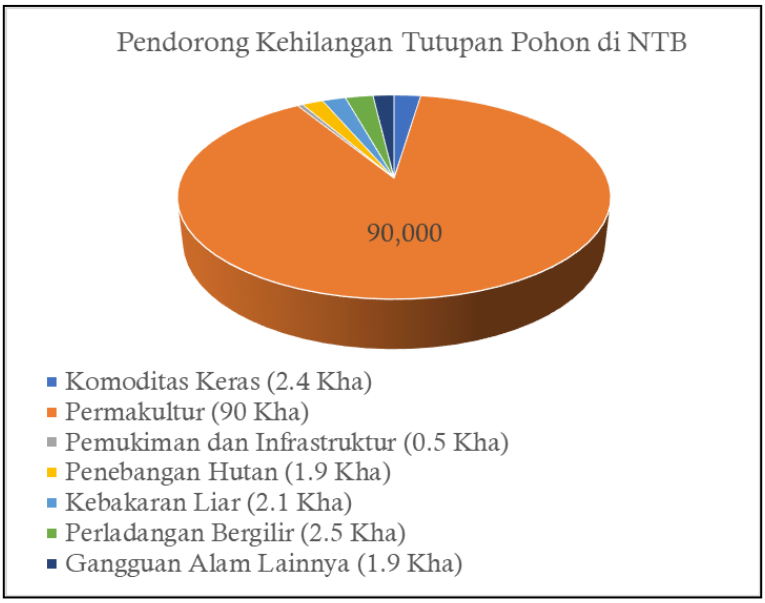
- Lokus Kabupaten Bima: Sebagai representasi krisis di bagian timur pulau, dari tahun 2001 sampai tahun 2024, terjadi kehilangan tutupan pohon sebesar 24.000 Ha demi pemenuhan target produksi jagung.
- Lokus Regional Dompu: Pola serupa terlihat di Kabupaten Dompu yang memposisikan jagung sebagai lokomotif pengentasan kemiskinan, namun berdampak pada perambahan kawasan hutan secara masif. Selama 2002-2024 kabupaten Dompu kelhilangan 25.000 ha tutupan pohon.
- Kabupaten Sumbawa yang merupakan pusat industri pengolahan setengah jadi dari jagung ini sendiri mengalami pengurangan tutupan pohon paling banyak yaitu 34.000 ha selama periode tahun 2001 sampai 2024
- Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan anomali regional dimana kehilangan tutupan pohon selama periode 2001-2024 hanya sebesar 7.000 ha. Di Kabupaten Sumbawa Barat (seperti kawasan Talonang Baru), budidaya jagung merambah pegunungan karena insentif harga yang tinggi dan kemudahan akses lahan yang diberikan oleh sistem birokrasi.

Table 1. Kehilangan tutupan pohon di NTB periode 2001 sampai 2024

No	Kabupaten /Kota	Kehilangan Tutupan Pohon
1	Sumbawa	34.000 Ha
2	Dompu	25.000 Ha
3	Bima	24.000 Ha
4	Sumbawa barat	7.000 Ha
5	Lombok Barat	6.000 Ha
6	Lombok Utara	2.300 Ha
7	Lombok Tengah	2.000 Ha
8	Lombok Timur	2.000 Ha
9	Kota Bima	550 Ha

Sumber; Global Forest Watch

Masih dari data Global Forest Watch, Gambar 1 menunjukkan kehilangan tutupan pohon di NTB meningkat menjadi rata-rata diatas 6.000 ha pertahun dimulai pada awal tahun 2014 sampai tahun 2024. Pada periode sebelumnya yaitu 2001 sampai tahun 2013 kehilangan tutupan pohon di NTB relatif masih dibawah 2.500 Ha pertahun. Faktor pemicu meningkatnya kehilangan tutupan pohon sejak tahun 2014 bisa dihubungkan dengan program PIJAR oleh pemerintah Provinsi NTB. Global Forest Watch sendiri mencatat bahwa faktor dominan pendorong deforestasi adalah pertanian musiman (permakultur) yaitu sebesar 90% dari kejadian deforestasi.



Gambar 2. Diagram Pie pendorong kehilangan tutupan pohon di NTB (Sumber: Global Forest Watch)

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)
Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas hasil produksi jagung di NTB ternyata dibayar dengan hilangnya benteng ekologis regional. Transformasi ini mengubah Pulau Sumbawa dari kawasan dengan hutan tropis kering yang tangguh menjadi hamparan pertanian monokultur yang rapuh secara ekologis.

Krisis Hidrologis Regional Pulau Sumbawa

Data menunjukkan bahwa rentetan bencana banjir dan kekeringan yang melanda Pulau Sumbawa merupakan Bencana yang Diinduksi oleh Kebijakan (Policy-Induced Disaster). Kegagalan visi pembangunan terlihat dari kontradiksi antara target ekonomi yang tercapai dengan anomali hidrologis regional yang meningkat tajam di seluruh kabupaten. Bencana banjir kini tidak lagi terbatas pada curah hujan ekstrem, melainkan menjadi rutinitas tahunan. Kabupaten Bima mencatat peningkatan frekwensi banjir tahunan. Pola yang sama terjadi di Kabupaten Dompu dan Sumbawa, di mana banjir bandang secara rutin merusak infrastruktur hilir akibat hilangnya fungsi resapan di kawasan pegunungan yang telah berubah menjadi ladang jagung. Pulau Sumbawa menghadapi krisis ganda. Di musim hujan, hilangnya vegetasi hutan di hulu menyebabkan limpasan permukaan (*surface runoff*) meningkat drastis menuju hilir. Sebaliknya, di musim kemarau, hilangnya kemampuan infiltrasi tanah mengakibatkan cadangan air tanah menipis, memicu kekeringan ekstrem secara regional.

Analisis ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi PIJAR telah menciptakan kerentanan struktural bagi warga Pulau Sumbawa. Pembangunan yang antroposentris ini gagal memahami bahwa rusaknya ekosistem regional di hulu akan selalu berakhir pada penderitaan manusia di hilir.

Ketiadaan Alternatif dan Lemahnya Pengawasan

Krisis ekologi regional ini diperparah oleh kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat. Secara struktural, pemerintah "menjebak" petani di Pulau Sumbawa dalam ketergantungan pada jagung karena hanya komoditas ini yang didukung penuh oleh bantuan sarana produksi dan kepastian pasar. Anomali pada Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang tidak menggantungkan ekonomi hanya pada sektor pertanian terutama program PIJAR. Akan tetapi Kabupaten Sumbawa Barat memiliki alternatif lapangan kerja lain yang menjadi tulang punggung ekonimi masyarakat.

Lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan di Pulau Sumbawa bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan etika pembangunan yang dangkal. Adanya ego sektoral antara dinas pertanian yang mengejar produksi dan dinas kehutanan yang menjaga kelestarian menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi, nilai ekonomi selalu diprioritaskan di atas nilai ekologi. Ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan inovasi ekonomi yang selaras dengan daya dukung alam Pulau Sumbawa membuktikan bahwa visi pembangunan yang diterapkan masih sangat antroposentris dan berorientasi jangka pendek.

SIMPULAN

Antroposentrisme Struktural dalam Kebijakan: Kebijakan PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) dan nomenklatur jagung di Pulau Sumbawa merupakan manifestasi nyata dari antroposentrisme struktural. Pemerintah secara sistematis menempatkan pertumbuhan ekonomi dan target produksi jagung sebagai prioritas tunggal, sementara integritas ekologis dipandang sebagai variabel sekunder atau bahkan diabaikan dalam kalkulasi pembangunan.

Kolonisasi Lifeworld: Dalam perspektif Jürgen Habermas, telah terjadi "Kolonisasi Lifeworld" di mana sistem ekonomi-politik (birokrasi dan pasar jagung) mendominasi ruang hidup masyarakat dan alam. Tindakan komunikatif yang berbasis pada kelestarian ekosistem digantikan oleh instruksi top-down demi mencapai angka-angka PDRB, yang berujung pada kerusakan permanen dunia kehidupan regional.

Deforestasi Regional dan Dampak Hidrologis: Kebijakan ini telah memicu transformasi lansekap yang destruktif di daratan Pulau Sumbawa. Data Global Forest Watch membuktikan penyusutan tutupan pohon di Pulau Sumbawa periode 2001 sampai 2024 mencapai 83.500 Ha, Menyumbang lebih dari 80% kehilangan tutupan pohon diseluruh NTB. Alih fungsi lahan ini berkorelasi langsung dengan fenomena Policy-Induced Disaster, yaitu rentetan bencana banjir bandang regional krisis kekeringan ekstrem akibat hilangnya fungsi resapan air tanah.

Kegagalan Visi Pembangunan: Krisis ekologi di Pulau Sumbawa adalah bukti kegagalan visi pembangunan pemerintah yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja alternatif bagi rakyat. Masyarakat terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada budidaya jagung yang eksploitatif karena absennya inovasi ekonomi sektor hilir dan lemahnya pengawasan struktural terhadap kawasan hutan.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ZONA
Jurnal Lingkungan
ISSN : 2502-6496 (Print)
ISSN : 2775-4065 (Online)

Volume 10, No 1, April 2026, p 51-56
http://zona.pelantarpress.co.id
https://doi.org/10.52364/zona.v10i1.219

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, I., Hardinandar, F., Ridwan., & Firmanto, T. (2024). Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1-15. DOI : 10.34304.

Beckert, S., Bosma, U., Schneider, M., & Vanhaute, E. (2021). Commodity frontiers and the transformation of the global countryside: a research agenda. *Journal of Global History*, 1-16. doi:10.1017/S1740022820000455.

Global Forest Watch. (2025). https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/20/?map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D.

Irawansah, D., Ridwan., Nasrullah., & Kasmar. (2023). Kebijakan Hukum Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Bima-NTB. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2). DOI : 10.34304.

Juhriati., & Erham. (2024). Kearifan Lokal "Ngaha Aina Ngoho" dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 117-134. DOI : 10.34304.

Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Moore, J. W. (2000). Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization. *Review (Fernand Braudel Center)*, 23(3), 409-433. https://www.jstor.org/stable/40241510,

Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23-45. doi: 10.22146/jf.49109.

Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2021). Problem Intrinsik dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 62-73. DOI: 10.24198/jwp.v6i1.27801.

Pane, I., Avianti Hadju, V., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Wiji Lestari, Z., Puspaning Galih, A., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2021). Desain penelitian mixed method. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Pemerintah Kabupaten Bima. (2021). *Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022*.

Ponto, J., Benu, N. M., & Kumaat, R. M. (2017). UPSUS PAJALE Dalam Menunjang Program Swasembada Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Agri-SosioEkonomi*, 13(2A),

Putra, A. S., Markum., & Wulandari, F. T. (2024). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Budidaya Jagung di Kawasan Hutan Desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa Barat. *Empiricism Journal*, 5(2), 153-168. https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.1916.

Rezeki, S. P., Sukiman., & Faza, A. M. D. (2023). Nilai-Nilai Filosofis Lingkungan Hidup dalam Karya A. Sonny Keraf. *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(5), Digital Object Identifier: 10.58578/masaliq.v3i5.1733.

Riyadi, A. (2018). *Pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung Air dalam Perencanaan Tata Ruang*. Tesis, Universitas Brawijaya.

Sukardi, L., Suparyana, P. K., & Septiadi, D. (2023). Tingkat Stabilitas Hasil Produksi Jagung di Nusa Tenggara Barat. *Agroteksos*, 33(1), 235-246.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)